

Post Disaster Recovery: Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Dan Berkelanjutan

Redha Kamalia¹, Muntaha Mardhatillah², Vellayati Hajat³, Najamudin⁴

Universitas Teuku Umar

Email: redhakamalia01@gmail.com

Kata kunci

Pemberdayaan masyarakat pesisir, Peningkatan kapasitas SDM, Pembangunan berkelanjutan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemberdayaan masyarakat pesisir setelah terjadinya bencana melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang berorientasi pada penguatan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya laut. Potensi tersebut diarahkan untuk dikelola secara berkelanjutan dan diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga mampu meningkatkan daya saing dan pendapatan masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Robert Chambers, yang menekankan prinsip *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan setelah terjadinya bencana yang efektif harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, dengan partisipasi aktif dalam setiap tahapan program. Selain itu, keberlanjutan program menjadi faktor penting agar proses pemberdayaan mampu menciptakan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Keywords

coastal community empowerment, human resource capacity building, sustainable development

Abstract

This study aims to analyze the role of coastal community empowerment through human post disaster recovery resource capacity building in achieving economic independence and poverty alleviation. Capacity building is carried out through training and mentoring oriented towards strengthening the skills, knowledge, and abilities of the community in managing and utilizing the potential of marine resources. This potential is directed towards sustainable management and processing into value-added products so as to increase the competitiveness and income of coastal communities. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The research analysis refers to the empowerment theory proposed by Robert Chambers, which emphasizes the principles of *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, and *sustainable*. The results show that effective development must place the community as the main subject, with active participation in every stage of the program. In addition, program sustainability is an important factor so that the empowerment process can create sustainable economic independence.

Pendahuluan

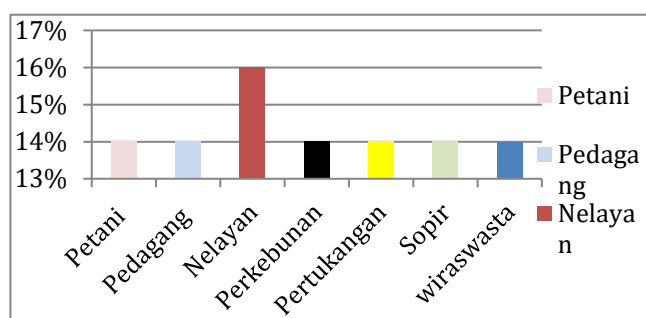
Pemulihan pasca bencana di wilayah pesisir melalui pemberdayaan masyarakat merupakan upaya strategis untuk membantu masyarakat bangkit kembali dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses pemulihan sosial dan ekonomi (hakim,2022). Bencana tsunami yang pernah terjadi pada 2004 di Desa Pulo menyebabkan kerusakan tidak hanya pada infrastruktur dan lingkungan pesisir, tetapi juga berdampak pada menurunnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya kemampuan masyarakat dalam bekerja, terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan, serta melemahnya produktivitas ekonomi masyarakat pesisir setelah bencana terjadi. Dampak tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat ikut menurun dan angka kemiskinan masyarakat pesisir semakin meningkat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pasca bencana dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan keterampilan guna meningkatkan kembali kapasitas SDM dan mendorong masyarakat agar mampu menciptakan sumber penghasilan secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat agar lebih siap menghadapi tantangan dan risiko bencana secara berkelanjutan.

Kondisi penurunan kapasitas SDM pasca bencana menjadi salah satu faktor yang memperkuat kemiskinan masyarakat pesisir di Desa Pulo. Kemiskinan masyarakat nelayan merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas SDM, keterbatasan teknologi, serta minimnya sarana penunjang ekonomi. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi penangkapan ikan menyebabkan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga pendapatan masyarakat tetap rendah. Padahal, masyarakat nelayan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui sektor perikanan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius melalui program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana di wilayah pesisir (Imadoeddin et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aguswan (2021) juga menjelaskan tentang Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Konsep Pembangunan Ekonomi yang Merangkum Nilai-Nilai Masyarakat untuk Membangun Paradigma dalam Pembangunan Bersifat *people-centred participatory*. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan materi, tetapi proses meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki kemampuan, kesadaran, dan kemandirian dalam mengelola potensi yang dimiliki. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, literasi ekonomi, serta penguatan organisasi lokal menjadi faktor kunci dalam mewujudkan masyarakat pesisir yang mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memutus ketergantungan ekonomi. Pemberdayaan menekankan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, literasi ekonomi, dan penguatan organisasi lokal. Dengan pendekatan ini masyarakat pesisir dapat mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan.

Tabel .1 Data diagram pekerjaan masyarakat Pulo
Sumber: Desa Pulo, 2026



Desa Pulo di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, adalah salah satu daerah pesisir yang mengalami masalah ini. Desa ini memiliki luas $\pm 4 \text{ km}^2$, terbagi menjadi tiga dusun: Nelayan, Ingin Maju, dan Ingin Jaya, dengan total penduduk 308 jiwa. Mayoritas bekerja sebagai nelayan (16%), sementara pekerjaan lain meliputi pertanian, perdagangan, perkebunan, pertukangan, sopir, dan wiraswasta (masing-masing 14%). Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat pesisir adalah keterbatasan kapasitas SDM, baik dalam keterampilan teknis, pengetahuan manajerial, maupun kemampuan mengakses informasi dan pasar, karena keterbatasan SDM ini juga berkaitan erat dengan rendahnya pendidikan formal di kalangan masyarakat pesisir,. Menurut data BPS Nagan Raya (2022) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di wilayah pesisir Desa Pulo hanya menamatkan pendidikan dasar, bahkan sebagian tidak menyelesaikannya. Rendahnya pendidikan formal yaitu berdasarkan data yang ada dari 308 penduduk desa pulo 37 orang tidak sekolah, SD 131 orang, SMP 55 orang, SMA 65 orang dan S1 20, dan banyak nelayan di Desa Pulo masih mengandalkan cara tradisional dalam menangkap ikan, mengelola usaha, maupun memasarkan hasil tangkapan ikan (BPS Nagan Raya, 2022).

Hubungan antara tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan bersifat saling terkait dan membentuk suatu siklus yang sulit diputus. Rendahnya pendidikan menyebabkan keterbatasan dalam keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga individu cenderung bekerja pada sektor dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan dan terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup (Fansury et al., 2025). Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 16,94 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi kemiskinan makro tersebut tercermin secara nyata di lokasi penelitian.

Berdasarkan data profil desa, terdapat 36 Kepala Keluarga (KK) dari total 90 KK di Desa Pulo yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 40% rumah tangga di desa tersebut berada dalam kategori ekonomi rentan.

Urgensi pemberdayaan di lokasi penelitian semakin dipertegas oleh profil demografis Desa Pulo yang tercatat dalam data BPS Kecamatan Kuala Pesisir tahun 2025. Desa Pulo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil di tingkat kecamatan, yakni hanya sebanyak 312 jiwa atau menyumbang sekitar 1,67% dari total populasi Kecamatan Kuala Pesisir. Meskipun secara kuantitas populasi ini relatif kecil, tingkat kepadatan penduduknya mencapai 337,11 jiwa per km², yang menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas masyarakat yang cukup tinggi di wilayah pesisir tersebut. Namun, konsentrasi penduduk ini tidak dibarengi dengan fasilitas pendidikan yang merata, di mana akses terhadap sekolah menengah masih sangat terbatas di tingkat kecamatan (District, 2025).

Kondisi demografis yang mikro ini, ditambah dengan status Desa Pulo sebagai desa tertinggal pasca-tsunami 2004, menjadikan masyarakatnya sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi (Fansury et al., 2025). Oleh karena itu, di tengah angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya yang mencapai 16,94%, program pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas SDM menjadi instrumen yang sangat strategis. Intervensi yang terfokus pada populasi kecil namun spesifik seperti di Desa Pulo ini justru berpotensi memberikan dampak yang lebih terukur dalam memutus rantai kemiskinan dan mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Perekonomian masyarakat pesisir ditingkatkan sebagian besar oleh potensi sumber daya laut (SDL) (Hanim Lathifah & Noorman Mohammad Shofii, 2018). Akan tetapi penggunaannya harus di dukung oleh SDM yang kompeten sehingga menghasilkan output dan outcome yang berkelanjutan dan tanpa merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi dasar dari pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengatasi kemiskinan struktural. Desa Pulo di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya berusaha melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi dan kemiskinan struktural.

Oleh karena itu program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, pengetahuan, dan keterampilan untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang potensial secara lebih produktif dan berkelanjutan, dengan mendorong masyarakat pesisir untuk memiliki kemandirian ekonomi dan mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kelompok usaha masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan akan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Mengacu pada permasalahan yang telah di jelaskan, penelitian ini menyoroti isu-isu krusial dalam pemberdayaan komunitas pesisir di Desa Pulo, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Analisis mendalam dilakukan dengan mengadopsi

kerangka teori Robert Chambers yang mencakup empat pilar utama. Pertama, pendekatan *people-centered* yang memprioritaskan warga sebagai subjek pembangunan. Kedua, aspek *participatory* yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat di setiap fase program, mulai dari perumusan hingga penilaian akhir. Ketiga, dimensi *empowerment* untuk memperkuat kompetensi masyarakat secara menyeluruh. Terakhir, prinsip *sustainability* guna menjamin program memiliki daya tahan jangka panjang serta manfaat yang berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir pasca bencana dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi dan untuk menemukan cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berlanjut secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai keterampilan teknis, pengetahuan manajerial, dan akses masyarakat terhadap informasi serta pasar, tetapi juga menyajikan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung masyarakat pesisir dalam mengelola potensi ekonomi mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mengumpulkan data tentang perilaku yang diamati dan deskripsi lisan dan tertulis dari individu (Moleong, 2007). Menurut (Creswell et al., 2017), Bagian metodologi sering kali menjadi penyumbang persentase Turnitin yang besar karena prosedurnya cenderung standar. Studi ini menerapkan desain kualitatif guna membedah fenomena sosial secara komprehensif, dengan menitikberatkan pada sudut pandang para aktor yang terlibat langsung dalam pemberdayaan di Desa Pulo, Nagan Raya. Fokus utamanya adalah mendeskripsikan bagaimana penguatan kapasitas SDM mampu menstimulasi kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Untuk memperoleh data yang relevan, terdapat 8 orang informan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), yang melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti pimpinan desa, tokoh masyarakat, ketua kelompok Meusare, serta pejabat dari instansi terkait seperti DPMG, DISPRINDAKOP, DKPP, dan pihak Kecamatan. Informasi dikumpulkan melalui dialog mendalam, pengamatan lapangan, serta penelaahan dokumen. Selanjutnya, data diproses melalui tahapan sistematis mulai dari kategorisasi hingga narasi bertema sesuai prosedur Creswell, dengan penjaminan validitas melalui pemeriksaan silang sumber dan teknik (*triangulasi*).

Hasil dan Pembahasan

Desa Pulo, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya: Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat pasca bencana untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Desa Pulo terletak di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, dan merupakan daerah pesisir dengan kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat bergantung pada laut. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan tradisional dengan peralatan tangkap sederhana dan skala usaha yang relatif kecil. Ketergantungan pada hasil tangkapan laut menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca serta musim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berdampak pada keterbatasan kemampuan dalam mengelola potensi ekonomi secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat sulit mengembangkan usaha alternatif di luar sektor perikanan tangkap, sehingga tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga nelayan masih cukup tinggi. Dalam konteks ini, masyarakat pesisir Desa Pulo dapat dikategorikan sebagai kelompok yang membutuhkan intervensi pemberdayaan secara berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Pulo diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan meliputi penguatan keterampilan, peningkatan pengetahuan, serta pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.

Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengelola potensi yang ada di Desa Pulo antara lain pelatihan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam waktu 4 bulan, penyuluhan kewirausahaan yang menekankan pada pengelolaan usaha kecil, serta pendampingan kelompok masyarakat dalam membangun kerja sama ekonomi. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir secara bijak agar aktivitas ekonomi yang dijalankan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui sosialisasi sebanyak 4 kali dalam waktu 4 bulan. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi tradisional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan peluang ekonomi yang lebih luas. Pasca bencana tsunami yang pernah terjadi di Desa Pulo, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir mengalami penurunan, terutama pada sektor mata pencaharian dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam jangka waktu yang cukup lama, masyarakat masih bergantung pada pola pengelolaan hasil perikanan secara tradisional, seperti menjemur ikan kemudian menjualnya secara langsung dengan nilai ekonomi yang relatif rendah. Oleh karena itu, melalui program *post disaster recovery*, masyarakat diberikan pelatihan pengolahan hasil tangkapan ikan menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat pesisir agar lebih mandiri, produktif, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi pasca bencana.

Pasca bencana tsunami yang pernah terjadi, kondisi masyarakat Desa Pulo mengalami banyak perubahan, terutama pada sektor ekonomi masyarakat pesisir. Sebagian besar masyarakat sebelumnya hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan yang dijual secara langsung atau dikeringkan secara tradisional sehingga nilai jualnya masih rendah. Melalui kegiatan pemberdayaan dan pemulihan pasca bencana (post disaster recovery), masyarakat mulai diberikan pelatihan pengolahan hasil perikanan, penyuluhan kewirausahaan, serta pendampingan kelompok usaha. Program tersebut memberikan dampak yang cukup baik karena masyarakat mulai memiliki keterampilan baru dalam mengelola hasil laut menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, kegiatan ini juga membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat pesisir agar lebih mandiri dan mampu mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulo, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi salah satu upaya penting dalam proses *post disaster recovery* di Desa Pulo. Kegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan, penyuluhan kewirausahaan, dan pendampingan kelompok usaha menunjukkan adanya proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat pesisir. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi ekonomi masyarakat pasca bencana, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri, produktif, serta mampu memanfaatkan potensi sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, program pemberdayaan memberikan dampak terhadap peningkatan keterampilan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Pulo.

Pemberdayaan tidak hanya mencakup elemen infrastruktur fisik, tetapi juga perubahan kapasitas individu dan masyarakat. Masyarakat telah menjadi lebih fleksibel dalam membangun bisnis yang berbasis potensi lokal sebagai hasil dari peningkatan keterampilan teknis, peningkatan manajemen usaha, dan pengetahuan tentang tata kelola keuangan dasar. Kondisi ini menunjukkan pergeseran menuju pola kemandirian ekonomi yang lebih produktif daripada pola yang bergantung pada bantuan eksternal. Masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program melalui forum musyawarah desa dan kegiatan kelompok. Keterlibatan meningkatkan legitimasi program dan rasa memiliki terhadap setiap intervensi pembangunan. Pemberdayaan telah berjalan secara inklusif dan berpusat pada masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh partisipasi aktif ini.

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Robert Chambers, yang menekankan pendekatan pembangunan berkelanjutan, partisipatif, pemberdayaan, dan berorientasi pada masyarakat. Chambers mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah ide pembangunan ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma pembangunan baru yang berpusat pada orang, melibatkan orang, memberikan kekuatan, dan berkelanjutan.

1. Orientasi Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat (*people-centered*)

Robert Chambers menyatakan bahwa pembangunan yang efektif harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima manfaat (Irmawati et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Desa Pulo telah diberdayakan melalui partisipasi mereka dalam berbagai program untuk meningkatkan kapasitas mereka. Karena pembangunan yang berhasil tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan mereka untuk mandiri, pendekatan masyarakat berpusat pada orang. (Romas Arina Nuraliza et al., 2025). Sehingga Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pembangunan yang berpusat pada masyarakat masih memerlukan penguatan agar pemberdayaan benar-benar berasal dari kebutuhan riil masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat di desa pulo berfokus pada masyarakat, yang menunjukkan upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Dengan mengidentifikasi potensi yang ada di desa pulo dan menemukan solusi untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan nya adalah untuk membangun pembangunan fisik dan keterampilan serta pengetahuan. Program pemberdayaan akan melatih dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mengurangi ketergantungan (Antonius Ary Setyawan et al., 2025). Salah satu contoh konkritnya adalah pembangunan rumah produksi untuk memproduksi nuget, abon rebon, dan crik crispy. Rumah produksi ini dibangun dengan dana desa dan akan digunakan oleh masyarakat untuk mengelola hasil tangkap laut untuk diolah secara modern dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Rumah produksi ini akan dikelola bersama oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi desa pulo. Yang mana Masyarakat terlibat dari awal perencanaan hingga pada tahap evaluasi (Seta et al., 2024)

2. Partisipasi sebagai Elemen Kunci Pemberdayaan (*participatory*)

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam teori pemberdayaan Chambers, karena memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam seluruh tahapan pembangunan (Padila Cisia, 2025). Di Desa Pulo, partisipasi masyarakat terlihat dalam keikutsertaan pada pelatihan dan kegiatan kelompok usaha yaitu pelatihan pembuatan produk crik crispy, abon rebon, dan udang rebon. Partisipasi pikiran Masyarakat merupakan elemen kunci keberhasilan suatu program pemberdayaan, melalui keterlibatan aktif Masyarakat dalam proses pelaksanaan, perencanaan hingga evaluasi, memberikan ruang bagi Masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan, dan Solusi, terkait permasalahan yang dihadapi (Sumirat Nur Istiqomah Mawarizqi Patina & Haryati Eny, 2025).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Adebayo & Butcher, 2023) Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan yang seringkali dianggap pasif dikarenakan pihak luar dapat mengontrol segala proses, sehingga pemberdayaan menjadi tokenisme, seharusnya pemberdayaan yang lebih dalam dapat memungkinkan masyarakat dapat berperan dan terlibat aktif, yang terakhir memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif sendiri. Berbeda dengan klaim Adebayo dan Butcher, (Hendra et al., 2023) menekankan bahwa pelibatan

kelembagaan berbasis komunitas dan intervensi program terpadu sangat penting, sedangkan penelitian dari (D. Puspitasari et al., 2023) lebih menekankan pendekatan pemberdayaan yang berbeda, seperti penggunaan teknologi digital. Selain itu, ada perbedaan dalam hal puspitasari, pendapat menurut (Diederichsen et al., 2025) lebih menekankan pada pendekatan multi-guna untuk kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan potensi wilayah pesisir. Menurut studi yang dilakukan di Desa Pulo, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Masyarakat sangat senang dengan program yang dibuat dan juga ikut berpartisipasi dalam mengikuti program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh dinas DKPP, mereka akan mendapatkan dukungan terus menerus untuk membantu menjalankan program karena program baru dimulai dan membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Jika ada yang ingin memberikan dukungan dan bimbingan lebih lanjut, masyarakat akan berterima kasih kepada mereka (Eka Fitriani, 7 april 2025). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat terbentuk secara instan. Partisipasi memerlukan proses pendampingan yang intensif, berkelanjutan, dan kontekstual agar mampu mendorong pemberdayaan yang nyata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat harus disertai dengan dukungan kelembagaan dan pendampingan yang berkesinambungan agar partisipasi dapat berkembang dari keterlibatan pasif menuju pemberdayaan yang substantif.

3. Peningkatan Kapasitas sebagai Proses Pemberdayaan (*empowerment*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi ekonomi yang dimiliki. Masyarakat mulai menyadari bahwa sumber daya pesisir dapat dikelola secara lebih produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang mana penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan ekonomi masyarakat setelah pelaksanaan program pemberdayaan. Sebelum program, keluarga nelayan hanya bergantung pada suami, dengan pendapatan rata-rata antara Rp1.200.000 dan Rp1.800.000 per bulan. Istri nelayan tidak memiliki sumber pendapatan mandiri. Namun, setelah dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengolahan dan pengelolaan hasil laut yang di pandu oleh DISPRINDAKOP, sekitar 65%–75% istri nelayan mulai terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp200.000–Rp350.000 per bulan. Dampaknya, total pendapatan rumah tangga meningkat menjadi Rp1.400.000–Rp2.150.000 per bulan. Dan Peningkatan kapasitas menurut (Puspitasari et al., 2019) memberikan penjelasan bahwa peningkatan kapasitas (*capacity building*) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan organisasi publik untuk menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Peningkatan kapasitas tersebut terdiri dari 3 (tiga) sektor yakni sumber daya manusia, penguatan organisasi dan penguatan sistem (*institutional reform*). Melalui pengembangan atau peningkatan kapasitas, masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan mereka (Chaskin et al., 2000).

Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki kendali atas keputusan dan keputusan hidup mereka sendiri (Chambers, 2025). Untuk meningkatkan kualitas masyarakat, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan di Desa Pulo diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dengan memaksimalkan potensi mereka agar mereka dapat mengambil bagian dan berperan dalam proses pembangunan (Amalia Dinda et al., 2024).

4. Keberlanjutan Program Pemberdayaan (*sustainable*)

Dalam teori pemberdayaan Chambers, prinsip keberlanjutan, atau keberlanjutan, merujuk pada pentingnya menjamin bahwa hasil pembangunan dapat bertahan dan berdampak dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan sosial dan ekologis. Keberlanjutan mencakup keberlanjutan ekonomi, sosial, dan kelembagaan, serta aspek lingkungan hidup. Chambers menekankan bahwa pembangunan yang tidak berkelanjutan pada akhirnya akan gagal mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat karena hanya memberikan solusi jangka pendek yang masyarakat tidak dapat mempertahankan (Angelina et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan harus memastikan bahwa masyarakat memiliki struktur, sistem, dan kemampuan untuk menopang pertumbuhan secara mandiri dan lestari tanpa bergantung pada gangguan dari luar. Pemberdayaan mencakup pembangunan sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mandiri dan berkelanjutan, bukan hanya hasil jangka pendek. Memberdayakan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan, secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, adalah tujuan dari program desa. Keberlanjutan adalah komponen penting dari pemberdayaan yang ideal. Selama wawancara, bersama dengan kepala desa pulo, mereka berharap hasil program pemberdayaan akan bertahan dan dapat dilihat dalam waktu minimal satu tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Nagan Raya bersama Camat Kuala Pesisir sangat mendukung pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Pulo. Upaya untuk mengintegrasikan program desa dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) melalui aplikasi Kemendes PDT menunjukkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan ini. Robert Chambers berpendapat bahwa pembangunan seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan, sehingga dukungan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (*people-centered development*).

Program pemberdayaan yang dilaksanakan, menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Pembangunan rumah produksi diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal, sementara pendirian PAUD berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Balai pengajian dan balai musyawarah menjadi ruang sosial yang memperkuat nilai kolektif, partisipasi, serta proses pengambilan keputusan secara demokratis di tingkat desa. Dalam perspektif *participatory development*, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut mencerminkan prinsip partisipasi aktif yang menjadi inti teori Chambers. Masyarakat tidak hanya menerima manfaat program, tetapi juga terlibat dalam proses identifikasi kebutuhan, pemanfaatan fasilitas, serta pengelolaan hasil

pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat secara bertahap.

Dengan demikian, dukungan DPMG dan pihak kecamatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemberdayaan yang menekankan penguatan kapasitas (*empowerment*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Program-program tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur sosial dan ekonomi desa yang lebih mandiri, partisipatif, serta berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat yang dikemukakan oleh Robert Chambers.

Simpulan

Kajian ini menjelaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir merupakan bagian penting dari proses *post disaster recovery* dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemulihan pasca bencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan kapasitas masyarakat agar mampu bangkit secara mandiri setelah terdampak bencana. Dengan menggunakan pemikiran Robert Chambers, penelitian ini menekankan empat pilar utama, yaitu *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainable*, yang menunjukkan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus aktor utama dalam proses pembangunan dan pemulihan pasca bencana. Sebelum adanya program pemberdayaan, kondisi masyarakat Desa Pulo masih ditandai dengan rendahnya partisipasi, keterbatasan keterampilan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Namun setelah program pemberdayaan dilaksanakan, masyarakat mulai terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Peningkatan kapasitas tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis dan peluang ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap potensi lokal yang dimiliki. Melalui pendekatan *post disaster recovery* yang berbasis pemberdayaan dan keberlanjutan, program ini mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang lebih mandiri, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, serta memastikan bahwa manfaat program dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan sosial maupun ekologis.

Referensi

- Adebayo, A. D., & Butcher, J. (2023). Community Empowerment in Nigeria's Tourism Industry: An Analysis of Stakeholders' Perceptions. *Tourism Planning & Development*, 20(4), 583–603. <https://doi.org/10.1080/21568316.2022.2127865>
- Amalia Dinda, Lestari Andi Karmila, & Sukmawati Lilis. (2024). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kewirausahaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. *Jurnal JAPS*, 5(1), 29–38.
- Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, & Rieneke Ryke Kalalo. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya 2024*. (01), 1–9.
- BPS Nagan Raya. (2022, February 25). *Nagan Raya Dalam Angka 2022*. <https://Naganrayakab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2022/02/25/Ff7ca5bdf1079b9cf21e96e8/Kabupaten-Nagan-Raya-Dalam-Angka-2022.Html>.
- Chaskin, R. J., Chipenda-Dansokho, S., & Toler, A. K. (2000). *Moving beyond the Neighborhood and Family Initiative: The final phase and lessons learned*.
- Creswell J, John W, & Creswell David. (2017). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Diederichsen, S. D., Weiss, C. V. C., Lima, F. A. V., dos Santos, B. A. Q., Guyot-Téphany, J., Thomas, J.-B. E., Lukic, I., Rebours, C., Walsh, J. P., McCann, J., Juell-Skielse, E., Gröndahl, F., & Scherer, M. E. G. (2025). Exploring the contribution of multi-use approach in fostering local blue economy: Insights from the Global South. *Ocean & Coastal Management*, 266, 107689. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107689>
- District, K. P. (2025). *KECAMATAN*.
- Fansury, H., Reiza Macella, A. D., Sari, R. I., Z.A, R. A., Ayu, M., Muntasar, M., Akbar, A. Z., & Zaskia, A. (2025). Lentera Pesisir: Penguatan Sdm Dalam Mewujudkan Desa Maritim Berkelanjutan Yang Berdikari Melalui Capacity Building Di Desa Pulo. *Bakti Banua : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 21–29. <https://doi.org/10.35130/1pvafy53>
- Hanim Lathifah, & Noorman Mohammad Shofii. (2018). Kebijakan Kelautan DalamRangka Menjaga dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 1–12.
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1), 72–80. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16880>
- Imadoeddin, Syaiful, Aristin Rini Aristin, Anam Syaiful, & Oktasari Anisa Fajriana. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Sumber Daya Laut (SDL) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan . *COVIT(Community Service of Health) : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 247–257.
- Irmawati, Mukhlis Suardi, & Salman. (2025). *Dari Desa Untuk Desa : Dinamika Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Lokal* (Salman, Ed.; 1st ed.). PT GANESHA KREASI SEMESTA.
- Moleong Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Padila Cisia. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 8–14.
- Puspitasari, D. C., Satriani, R., & Pmungkas, S. B. (2019). Pengembangan Kapasitas Masyarakat Partisipatif: Studi Implementasi Program Saemaul Undong Di Kabupaten Gunung Kidul DIY. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.17977/um021v4i1p1-13>
- Puspitasari, D., Chasanah, A. N., & Wardhani, M. F. (2023). Strategi Peningkatan Ketahan Ekonomi Untuk Perikanan Berkelanjutan Berbasis Konsep Blue Economy

- . *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 215–225.
<https://doi.org/10.32534/jv.v18i2.3836>
- Qur'ainny Angelina, Sianipaar Gloria Stevanie Nauli, Rozan Muhammad Azka, & Afifah Dian Fitriani. (2025). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cileles Berdasarkan Persepektif Teori Pemberdayaan Oleh Robert Chambers. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(2), 6252–6259.
- Romas Arina Nuraliza, Hidayah Nurul, Wasil Mohammad, Rahmy Hafifatul Auliya, Yanthy Normalia Ode, Batiari Ni Made Padma, & Tarigan Frida Lina BR. (2025). *Strategi Efektif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal* (Sari Mila, Ed.; 1st ed.). Cv Get Press Indonesia.
- Seta, D. R., Santosa, M. Y., Andalusia, S. C., Takbirryansyah, A., Parahitha, C. D., Sanjaya, A. S., Jannah, N. A. R., Prasetya, A. F., Febriyanti, O. S., Alvandio, C., Farianto, I. T., Sasabila, D. N., Tarigan, Y. C., Valentino, B. T., & Putri, Z. A. E. (2024). Rame Gurame: Akselerasi Ekoomi Lokal Melalui Program “Kampung Gurami” Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Hilirisasi Produktivitas Potensi Desa Tegal wangi. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 5(3), 861–869. <https://doi.org/10.35870/jpni.v5i3.1077>
- Sumirat Nur Istiqomah Mawarizqi Patina, & Haryati Eny. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik dalam Menjadikan Surabaya sebagai Kota Tujuan Wisata. *Jurnal Soetomo Administrasi Publik*, 3(1), 185–200.